
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membangun Literasi Politik dan Budaya Politik Warga Negara Muda
Citizenship Education as an Effort to Build Political Literacy and Political Culture for Young Citizens

Imam Alfikri Pratama

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Abstract

The efforts to provide political understanding to young people as a potential demographic group is an effort to build democratic civility. Good political material will provide them with the skills as good political participants and actors. The major focus point is to shape sufficient political literacy for the young people as a foundation to build an ideal political culture to develop a good national democracy. One way to develop this political knowledge is through civic education. As a political education, civic education plays a role in shaping good citizenship that can carry out civic duties. This article uses a literature approach that offers a theoretical review of how civic education can become political education for young people.

Keywords

Citizenship Education, Political literacy, Political culture

Abstrak

Memberikan pemahaman politik kepada Warga Negara muda sebagai kelompok demografi potensial adalah usaha membangun keadaban demokrasi. Dengan Materi politik yang baik akan memberikan mereka keterampilan sebagai partisipan maupun pelaku politik yang baik. Titik fokus utamanya adalah bagaimana membentuk Political literacy yang cukup bagi warga negara muda sebagai landasan dalam membangun Political Culture ideal bagi perkembangan demokrasi bangsa yang baik. Salah satu cara menyemai pengetahuan politik ini adalah melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai pendidikan politik, Pendidikan Kewarganegaraan berperan membentuk a good citizen yang bisa mengemban Civic Duties. Artikel ini dengan menggunakan pendekatan kepustakaan menawarkan ulasan teoritis tentang bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi Pendidikan Politik bagi Warga Negara muda.

Keywords

Pendidikan kewarganegaraan, Literasi politik, Budaya politik

Korespondensi

Imam Alfikri Pratama

imam.alfikri@iainsasbabel.ac.id

Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi proses demokratisasi mutlak memerlukan peran dan keikutsertaan warga negara dalam urusan pemerintahan utamanya dalam bidang politik. Warga negara harus terbangun kesadarannya untuk ikut terlibat dalam kehidupan dan proses politik berbangsa dan bernegara baik sebagai pelaku maupun partisipan politik. Warga negara yang memiliki dorongan untuk ikut serta dan memainkan peran dalam urusan politik adalah warga negara yang memiliki pemahaman tentang politik. Paham politik adalah dimana warga negara secara sadar mengerti hak dan kewajibannya, utamanya dalam bidang politik dan kemudian ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses politik, proses perumusan kebijakan, memantau implementasi kebijakan publik dan ikut terlibat sebagai kontrol sosial bilamana kebijakan publik tersebut keluar dari haluan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui penanaman nilai-nilai politik melalui sebuah usaha pendidikan politik.

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi yang menuju kearah lebih baik dengan proses demokratisasi yang terus berjalan maju ke depan memerlukan warga negara yang mutlak memiliki keterampilan politik yang baik. Pemahaman terhadap konsep politik melalui pendidikan politik bagi warga negara harus berjalan beriringan dengan proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia dan tentu saja pendidikan politik yang diberikan harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Salah satu elemen warga negara yang wajib dan harus melek politik adalah warga negara muda. Dengan jumlah warga negara muda yang cukup besar serta akan mengalami bonus demografi, maka membangun keterampilan politik warga negara muda Indonesia adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Warga negara muda memiliki peran penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dibuktikan dengan setiap peristiwa sejarah bangsa, warga negara muda selalu muncul sebagai motor penggerak. Selain itu warga negara muda merupakan penerus estafet perjalanan bangsa ini. Bagaimana bangsa ini akan terus berjalan ke arah yang baik bila warga negara muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini awam terhadap politik.

Jumlah warga negara muda dalam struktur warga negara Indonesia memiliki jumlah yang signifikan, mereka ini merupakan tulang punggung utama bagi laju gerak demokrasi. Sebagian dari mereka ini terdidik secara akademik bahkan mengeyam pendidikan tinggi. Warga negara muda bisa muncul sebagai kekuatan moral dan agen perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara muda yang lekat dengan pendidikan dan memiliki kemampuan secara akademis dan intelektualitas harusnya memiliki wawasan kebangsaan dan tertarik pada pemikiran masalah sosial politik kenegaraan bangsa. Di tengah politik yang kian dipersepsikan negatif karena banyak menampilkan muka buruknya membangun keterampilan politik warga negara muda merupakan hal yang penting. Sebagai kekuatan moral warga negara muda dengan keterampilan politik dan memiliki *political literacy* mahasiswa akan menjadi *role model* dan garda terdepan pembangunan *Political Culture* bangsa.

Indonesia akan mengalami bonus demografi sekian tahun ke depan, hal ini bisa dilihat dari demografi warga negara muda yang lahir antara tahun 1981-2000 menurut Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2017 adalah 88 juta jiwa atau 33,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2018). Ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi keberlangsungan demokrasi bangsa. Sebagai pemilik suara mayoritas warga negara muda ini punya peran signifikan dalam setiap proses politik.

Peluang karena di tengah laju perkembangan teknologi yang sudah memasuki era digital warga negara muda ini memiliki ketertarikan yang cukup baik terhadap politik kebangsaan, Salah satu contohnya adalah di era digital sekarang ini, penggunaan media sosial bagi warga negara muda merupakan saluran dominan bagi mereka untuk terlibat dalam urusan sosial politik. mereka menjadikan media sosial sebagai *platform* untuk terlibat dalam urusan politik. Wajah partisipasi politik mengalami perubahan yang signifikan karena digitalisasi. Para warga negara muda terlibat di dalam partisipasi politik dengan berbagai bentuk dan kreativitas secara *online*. Kualitas demokrasi dalam sebuah negara ditentukan oleh kualitas partisipasi warganya, pada titik ini demokrasi kita ternyata terus berkembang. tersedianya ruang yang cukup untuk melakukan partisipasi melalui ruang-ruang digital dimanfaatkan dengan baik oleh warga negara muda.

Kedua, bonus demografi juga sekaligus tantangan, Realitas politik yang terjadi di dunia digital ini adalah pengetahuan politik warga negara muda yang kurang, keterlibatan mereka dalam ruang-ruang publik kadang terpengaruh oleh isu-isu tidak benar, hal ini didukung oleh kenyataan bahwa politik selama ini hanya menampilkan sisi buruknya karena banyak contoh tidak baik yang muncul dari proses politik di bangsa ini. Belum lagi Politik kenegaraan bangsa mengalami apa yang disebut dengan minus keteladanan. Hal ini menyebabkan politik hanya dipandang sisi buruknya sebagai hal yang harus di jauhi.

Partisipasi atau keterlibatan politik bisa dilihat dari kemampuan dan keterampilan dari warga negara untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk dan berbagai macam aspek. Seperti inisiatif untuk terlibat dalam pembuatan agenda publik, memonitor, mengevaluasi, menganalisis, dan mengkritisi kebijakan, sampai melakukan konsensus atau musyawarah terhadap kebijakan publik. Yang kemudian tampak adalah keterlibatan politik warga negara muda berjalan lebih lambat daripada laju apatisisme politik mereka. Hal ini ternyata ditopang oleh kurangnya pendidikan politik yang diterima oleh warga negara muda. Sehingga mereka cenderung tidak mau menerima pemahaman politik yang cukup, tentu saja kurangnya pengetahuan politik tidak bisa membangun *political literacy* dan ujungnya budaya politik ideal tidak akan tercipta Hal ini merupakan hal yang harus diperbaiki melalui pendidikan politik.

Melek politik menjadi hal sentral dalam membangun kualitas demokrasi suatu bangsa. Warga negara yang memiliki *political literacy* adalah warga negara yang memiliki pengetahuan politik, untuk membangun pengetahuan politik tentu dibutuhkan pemberian pemahaman dan keterdidikan politik. Melek politik juga menuntut pemahaman dan pengetahuan warga negara terhadap sistem politik dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Kantaprawira (2004) mendefinisikan melek politik sebagai perwujudan dari pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Almond dan Verba (1990) mengemukakan dua kriteria untuk mengukur dimensi melek politik yakni, pertama mengikuti segala kegiatan pemerintah. Kedua mengikuti laporan mengenai aktifitas pemerintah melalui berbagai media. Kriteria tersebut merupakan penggambaran bagaimana peran dan partisipasi warga negara dalam jalannya sistem politik suatu negara. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melihat tingkat melek politik warga negara, seperti pengetahuan konststitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, perilaku politik, dan partisipasi politik.

Pendidikan politik sebagai salah satu instrumen dalam membangun keterdidikan politik yang muaranya membentuk pemahaman politik (*political literacy*) erat kaitannya dengan budaya politik. Melalui pendidikan politik akan terbentuk *political literacy* yang melahirkan kebudayaan politik sebagai pendukung pembangunan sebuah sistem politik ideal. Alfian (1978) mengemukakan bahwa :

Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih sempit) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil dari penghayatan itu akan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu dan bersamaan dengan itu lahir pulalah kebudayaan politik baru.

Budaya politik adalah pola perilaku warga negara dalam kehidupan politik pada suatu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Pola perilaku merupakan orientasi yang mereka miliki, yang tumbuh dan berkembang serta dibangun oleh nilai-nilai dalam sistem politik tersebut. Almond dan Verba (dalam Simamora, 1990) mengartikan kebudayaan politik suatu bangsa sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus yang menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu tidak lain adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang di hayati oleh para anggota suatu sistem politik. Dengan memiliki *political literacy* maka akan terbangun budaya politik yang baik dan akan mendukung keberlangsungan proses demokrasi dan demokratisasi bangsa ini.

Berangkat dari fenomena diatas, artikel ini mengurai bagaimana Pendidikan Kewarganegaran bisa menjadi wahana membangun *political literacy* dan mendukung terciptanya *political culture* ideal bagi warga negara muda. Dengan menggunakan studi pustaka sebagai referensi data dan teori, tulisan ini mengkonstruksi bagaimana seharusnya muatan materi politik bagi warga negara muda dalam pendidikan

kewarganegaraan.

Pembahasan

Muatan Politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam praktiknya, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia dipahami sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara agar memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Budimansyah, 2010). Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dengan kajian dan pembahasan yang mencakup pengetahuan tentang kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat menuju masyarakat madani. Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) memberikan wawasan kepada peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berkeadaban (*Intelligent and Civilized Citizens*). *Civic intelligence* dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara masyarakat, serta mampu mentransformasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Ubaedillah dan Rozak).

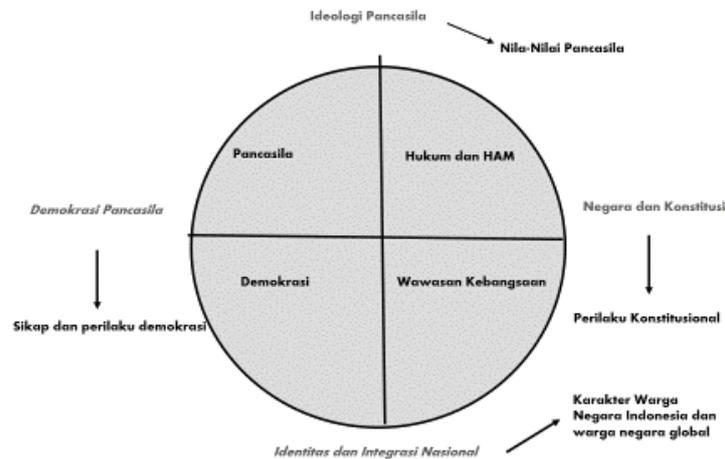
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara berpikir dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga negara. Konsep pendidikan kewarganegaraan memberikan kontribusi terhadap pengembangan unsur-unsur yang harus dikuasai oleh setiap warga negara: pengetahuan, keterampilan nilai, komitmen dan kompetensi yang ideal yang harus dimiliki setiap warga negara dan pada akhirnya mampu menjalankan perannya dalam negara demokratis. Dengan karakteristik seperti itu warga negara memiliki kemampuan dalam melakukan partisipasi (*political efficacy*). Menurut Schulz (2005) kemampuan berpolitik atau *political efficacy* adalah suatu kepercayaan warga negara bahwa kondisi sosial politik dapat diubah. Orang mau berpartisipasi dalam politik karena warga negara mempunyai kepercayaan politik dan mampu memainkan peran dalam melakukan perubahan tersebut. Lebih daripada itu Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bertanggung jawab untuk menyiapkan warga negara milenial untuk melakukan praktik partisipasi yang akan menciptakan demokrasi berkeadaban.

Wahab dan Sapriya (2011) mengungkapkan bahwa peran warga negara yang baik (*a good citizen*) yang bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai warga negara (*to reform certain duties*) diantaranya mematuhi hukum, membayar pajak, menghormati hak-hak orang lain, serta secara umum memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya sebagai masyarakat. Warga negara yang baik ini memiliki banyak kompetensi salah satunya adalah kompetensi politik, inilah titik persinggungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik, dimana secara sempit pendidikan politik dilihat sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan. Lebih lanjut melalui Pendidikan politik pada Pendidikan Kewarganegaraan dapat membina peserta didik menjadi warga negara yang melek politik. peserta didik pada titik ini adalah mereka yang masuk mengenyam pendidikan formal, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Hal ini menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembelajaran bagi warga negara muda. Warga negara muda adalah mereka yang masih mengenyam bangku pendidikan ini, bagian terbesarnya adalah mereka yang duduk di bangku sekolah menengah dan pendidikan tinggi,

Claes, dkk (2009) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraansebagai program Pendidikan Politik yang tugas peran utamanya membina peserta didik menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai proses pembelajaran memiliki multi tujuan, karena berhubungan dengan karakter warga negara. Branson merumuskan tiga komponen Kewarganegaraan yang esensial yaitu *Civic Knowledge* : pengetahuan kewarganegaraan, *Civic Skills* : keterampilan kewarganegaraan, dan *Civic Disposition* : sikap atau watak kewarganegaraan (Winarno 2013)

Ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan yakni kecerdasan intelektual warga negara (*Civic Intelligence Quotient*). Lebih lanjut bisa dijabarkan sebagai berikut : warga negara yang memiliki sikap dan pengetahuan kewarganegaraan akan membentuk kepercayaan diri warga negara (*civic confidence*). Selanjutnya dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadikan warga negara memiliki keterampilan berpartisipasi (*civic competence*). Kemudian warga

negara yang memiliki keterampilan berpartisipasi akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen kebangsaan kuat (*civic commitment*). Hal ini menjelaskan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah Pendidikan yang memiliki muatan materi politik, dilihat dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Beberapa materi yang secara langsung bersinggungan dengan politik menurut rumusan Pratama IA (2020) adalah



Gambar I Materi Poltik PKn (diadaptasi dari Pratama IA 2020)

Dari rumusan diatas materi pokok yang harus menjadi *core* dari materi dari usaha membangun *Political Literacy* dan *Political Culture* dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Hukum dan HAM, Demokrasi, serta Wawasan Kebangsaan. Materi ini menjadi dasar membangun struktur kurikuler materi politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya bisa diterjemahkan kedalam perluasan materi yaitu ideologi Pancasila yang tujuannya adalah menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, kemudian Negara dan Konstitusi yang memuat tujuan terbentuknya perilaku konstitusional. Ketiga adalah Identitas dan Integrasi Nasional hal ini berkaitan dengan karakter individu sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai warga negara global. Terakhir adalah demokrasi Pancasila ini berkaitan dengan keterampilan politik warga negara dalam berdemokrasi

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang erat kaitannya dengan karakter warga negara ini menjadikannya penting bagi penyiapan warga negara muda yang bisa bersikap dan bertindak sebagai partisipan maupun pelaku politik. dalam rumusan Wahab dan Sapriya (2011) bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang bersinggungan dengan karakter warga negara muda adalah sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rumusan lain dijelaskan Branson (dalam Winarno 2013) bahwa

What are essential components of a good civic education? There are three essential components: civic knowledge, civic skills, and civic disposition. The first essential component of civic education is civic knowledge that concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skills:

intellectual and participatory skills. The third essential component of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy.

Pada penjelesan di atas, Branson menyatakan bahwa ketiga komponen pendidikan kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). *Civic knowledge* berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. *Civic skills* merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstitusional.

Literasi Politik Sebagai Penyokong Budaya Politik

Melek politik (*Political Literacy*) adalah pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, isu politik, isu publik serta kebijakan publik, kemudian secara sadar mengambil peran dalam isu dan proses tersebut. Denver and Hands dalam (Carol A. Cassel and Celia C 1997) mendefinisikan *political literacy* sebagai *"the knowledge and understanding of the political process and political issues which enables people to perform their roles as citizens effectively."* . Dari pedapat di atas melek politik di maknai sebagai pengetahuan terhadap proses politik dan isu politik warga negara hal ini menjadika melek politik merupakan hal sentral dalam pembangunan kualitas demokrasi dalam sebuah sistem politik.

Kantaprawira (2004) mengartikan melek politik sebagai perwujudan dan pendidikan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Di sini melek politik merupakan perwujudan dari pendidikan politik yang membangun pemahaman politik dan lebih menitikberatkan pada aspek partisipasi politik. Dalam prakteknya melek politik erat dengan pemahaman warga negara tentang pengetahuan dan nilai-nilai politik secara utuh. Crick dan Porter (dalam Fyfe, 2007) berpendapat bahwa warga negara yang melek politik adalah :

A person who has a fair knowledge of what are the issues of contemporary politics , is equipped to have some influence, whether in school, factory, volantory body or party, and can understand and respect, while not sharing, the values of others, can reasonably be called "politically literate".

Melek politik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh warga negara dalam memahami sistem dan isu politik serta pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap proses tersebut melalui kegiatan partisipatiif. Melek politik juga bisa didefinisikan sebagai melek kewacanaan. Melek politik merupakan kesadaran politik yang timbul dari pengetahuan politik yang diterima oleh seseorang.

Anna Douglas (2002) mengemukakan Seseorang yang melek politik akan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa hal berikut :

- a. That politics happens in everyday life - in families, local, national and international communities, schools, workplaces, clubs, parties, pressure groups, trade unions, and in informal groups such as football crowds, bus queues etc. As Frazer (1999) suggests 'Politics, that is the economy of power, the contest for and about the power to govern, is everywhere – in social institutions, and in personal relationships including friendship and kinship networks' (1999:15);
- b. What the main disputes are about with reference to the context: the different views, arguments and perspectives of participants including marginalized groups;
- c. Systems for the distribution of power and decision making;
- d. Ways in which citizens can participate in the political process – locally, nationally and internationally;
- e. Ways in which resources (eg. capital, labour, land, income, public services, natural resources) are produced, distributed and organized, at a local, national and global level;
- f. Activities of cooperation and conflict of interests, within and between societies;
- g. How the media, government and pressure groups present issues and appreciation of the need to deconstruct key messages;

- h. Key concepts that underpin systems and perspectives and are used in everyday political discussion and debate;
 - i. Understanding that concepts such a freedom can used by varying groups for different agendas.
- Almond dan Verba (1990) mengemukakan dua kriteria untuk mengukur dimensi melek politik yakni, pertama mengikuti segala kegiatan pemerintah. Kedua mengikuti laporan mengenai aktifitas pemerintah melalui berbagai media. Dalam INPRES Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, ditentukan tolak ukur dalam mengukur kesadaran politik mencakup :
- a. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya terhadap kepentingan bangsa dan negara.
 - b. Sadar dan tata pada hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Memiliki disiplin diri, sosial dan nasional
 - d. Memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan objektif bangsa saat ini
 - e. Mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
 - f. Berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha pembangunan nasional.
 - g. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran dan keanekaragaman suku bangsa.
 - h. Sadara akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang
 - i. Mampu melakukan penilaian terhadap gagasan nilai serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain diluar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pada pikiran atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945

Dari Pendapat di atas ada banyak kriteria untuk mengatakan bawah seseorang telah melek secara politik. Diantaranya meliputi : pengetahuan konstitusi dan sistem politik, pemahaman politik, sikap politik, perilaku politik, dan partisipasi politik. Kesemuanya merupakan sebuah kesatuan utuh dalam konteks pengetahuan politik warga negara muda. Pengetahuan politik warga negara muda ini dilihat dari sudut pandang yang luas adalah penyokong terbentuknya budaya politik. Dari pengetahuan politik yang didapat warga negara muda melakukan refleksi terhadap sistem politik kemudian menjadi penyokong terbentuknya budaya politik.

Kantaprawira (1984) memberikan definisi budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota sistem politiknya. Sedangkan Almond dan Verba dalam Alfian dan Sjamsudin (1991) menjelaskan bahwa budaya politik adalah suatu sikap orientasi khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Budaya politik bisa di definisikan sebagai pola perilaku warga negara dalam kehidupan politik pada suatu sistem politik yang dianut oleh sebuah negara. Pola perilaku merupakan orientasi yang mereka miliki, yang tumbuh dan berkembang serta dibangun oleh nilai-nilai dalam sistem politik tersebut.

Lebih lanjut Almond dan Verba menyebutkan bahwa budaya politik terkait pola tingkah laku individu berkaitan dengan kehidupan politik di suatu sistem politik. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan respons-responsnya, dukungannya dan orientasinya terhadap sistem politik itu. Budaya politik diwarnai oleh interaksi antara orientasi dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sehingga terjalin proses integritas kearah pengembangan budaya bangsa. Alasan diatas menjadikan pengetahuan politik (*political literacy*) sebagai penyokong utama terbentuknya orientasi terhadap sistem politik yang muara akhirnya adalah terbangunnya budaya politik (*Political Culture*).

Menurut Rusadi Kantaprawira budaya politik sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional struktur politik ditentukan oleh konteks kultural tempat struktur itu berada. Menurut Almond, dilihat dari sudut fungsinya bertujuan untuk mencapai atau memelihara stabilitas politik dengan baik pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan itu dengan struktur politiknya. Dengan demikian, apabila struktur politik telah dapat berfungsi dengan baik. Atau dengan kata lain budaya

politik suatu bangsa telah mencapai tingkat kematangan (Sastroadmodjo, 1995). Artinya kematangan budaya politik ditandai dengan berfungsinya struktur politik yang ada dengan baik. Struktur politik yang ada ditentukan berdasarkan kultur yang berlaku di negara tersebut. Budaya politik terkait dengan pola tingkah laku individu berkaitan dengan kehidupan politik di suatu sistem politik. Hal ini merupakan cara pandang individu terkait dengan objek politik. Almond dan Verba (dalam Sastroadmodjo, 1995) melihat bahwa pandangan tentang objek politik terdapat tiga komponen:

- 1) Komponen pertama adalah komponen kognitif, yaitu komponen yang menyangkut tentang politik dan kepercayaan politik, peranan dan segala kewajibannya.
- 2) Komponen kedua ialah orientasi afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya.
- 3) Komponen ketiga adalah orientasi evaluatif, yakni keputusan tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai-nilai kriteria dengan informasi dan perasaan.

Bentuk budaya politik menyangkut banyak aspek diantaranya tata nilai, norma, dan sikap seseorang terhadap sistem politik. Setiadi dan Kolip (2013, hlm. 97) mengatakan bahwa : Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat, diantaranya menyangkut, yaitu: 1) pola kepemimpinan apakah pola-pola tersebut bersifat konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan atau cenderung otoriter; 2) sikap terhadap mobilitas politik termasuk mekanisme mempertahankan *status quo* dan mendorong mobilitas politik; 3) prioritas kebijakan politik termasuk menekankan pada skala prioritas apakah aspek ekonomi atau politik. Semuanya tentu didasarkan pada budaya politik yang berlaku di dalam struktur politik itu sendiri.

Budaya politik merupakan interaksi antara orientasi dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat sehingga terjalin proses integrasi ke arah pengembangan budaya politik bangsa yang ideal. Kantaprawira (1985) mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

1. Budaya politik parokial (*parochial political culture*)
2. Budaya politik kaula (*subject political culture*)
3. Budaya politik partisipan (*participant political culture*)

Budaya politik parokial biasanya di temukan pada masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia seperti pada masyarakat pedalaman. Budaya politik parokial terbatas pada wilayah atau lingkup kecil. Budaya politik kaula yaitu dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya sedangkan perhatian pada aspek input dikatakan nol. Sedangkan budaya politik partisipan merupakan bentuk yang sebaliknya dari budaya politik kaula dimana perilaku politik lebih di dasarkan pada kesadaran sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik.

Melihat budaya politik tidak bisa dilepaskan dari perilaku politik. Sastroadmodjo (1995) mengemukakan bahwa dalam konteks budaya politik , perilaku politik merupakan suatu kaitan yang teramat penting, perilaku politik berkaitan dengan respon terhadap sistem dan struktur politik yang ada. Berdasarkan pendapat diatas terbangunnya suatu budaya politik tidak bisa dilepaskan dari perilaku politik individu dalam sebuah sistem dan struktur politik. Budaya politik akan saling mempengaruhi terhadap perilaku politik warga negara dan aktor politik.

Dalam konteks Indonesia budaya politik di Indonesia merupakan budaya politik yang khas. Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia menjadikan budaya politik Indonesia berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya. Sastroadmodjo (1995) mengemukakan bahwa keanekaragaman kultural merupakan hal yang mendorong terciptanya pengaruh yang besar dalam budaya politik, banyaknya budaya-budaya daerah telah menghadirkan banyaknya subbudaya politik, yang masing-masing memiliki jarak yang berbeda-beda dengan struktur politik. Beragamnya budaya daerah yang menjadi pendukung struktur politik ini juga menghasilkan sebuah budaya pendukung struktur politik yang baru. Setiadi dan Kolip (2013) menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan sosial dan kebudayaan, ikatan-ikatan seperti itu sedikit demi sedikit makin luntur, perubahan sosial budaya berakibat pada perubahan sikap-sikap politik

tradisional tersebut berubah mengarah pada orientasi politik yang bersifat pragmatis.

Secara keseluruhan budaya politik yang ada di Indonesia adalah budaya politik Pancasila. Budaya politik Pancasila merupakan sebuah budaya politik yang ideal dalam konteks keIndonesiaan. Pancasila merupakan *staatsfundamental norm* dari bangsa Indonesia sehingga sistem politik dan politik kenegaraan Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Budaya politik yang harus diwujudkan dan dikembangkan adalah budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Moerdiono (dalam Alfian dan Sjamsuddin 1995) mengemukakan bahwa budaya politik demokrasi Pancasila sebagai keseluruhan sikap, perilaku, dan perbuatan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila, dan dalam lembaga-lembaga serta struktur yang disepakati dalam konstitusi kita, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Dari perspektif ini budaya politik Pancasila merupakan pola perilaku warga negara dalam sistem politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Budaya politik Pancasila merupakan perwujudan dari bagian seluruh budaya Indonesia yang majemuk. Hal ini menjadikan titik utama pembangunan *Political Literacy* bagi warga negara muda untuk membangun *Political Culture* yang baik adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik harus menjadikan Pancasila sebagai sumber utama atau ruh dari pengembangan materi politiknya.

Kesimpulan

Warga negara muda adalah mereka yang akan menjaga *Political Efficacy* bagi keberlangsungan demokrasi bangsa ini ke depan. Pemahaman politik yang baik harus diberikan kepada mereka ini sebagai usaha menjaga keadaban demokrasi. Tak kurang materi politik yang diberikan untuk membentuk *Political Literacy* adalah nilai-nilai politik yang bisa menjadi bekal bagi mereka sebagai partisipan maupun pelaku politik. Materi-materi tersebut sudah *include* dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang mereka dapatkan di bangku sekolah formal. Diantaranya adalah Pancasila, Hukum dan HAM, Demokrasi, serta Wawasan Kebangsaan. Materi ini menjadi dasar dalam membangun struktur kurikuler pendidikan politik. Sebagai landasan utamanya adalah nilai-nilai dalam Pancasila, nilai Pancasila harus dijadikan landasan karena internalisasi nilai-nilai Pancasila akan menopang *Political Literacy* mereka sesuai dengan nilai-nilai Bangsa.

Dari materi politik yang ada pada Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya ada empat tolak ukur dalam pengembangan kurikulumnya yaitu pengetahuan politik, keterampilan intelektual, keterampilan partisipasi politik, dan sikap politik. Pendekatan pembelajaran politik bagi warga negara muda ini selain dalam kelas-kelas formal juga harus dilengkapi dengan bentuk-bentuk pengayaan, misalnya memberikan ruang diskusi dan tanya jawab kritis terhadap situasi kebangsaan yang sedang terjadi. Hal ini penting karena para warga negara muda pada era digital ini sangat terpapar oleh arus disrupsi informasi, informasi yang mereka terima dari kanal-kanal digital kadang bersifat tidak benar dan ini tentu saja mempengaruhi penerimaan mereka terhadap politik. Untuk itulah ruang diskusi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disertai dengan landasan teoritis yang kuat sangat diperlukan.

Target pertama materi politik dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah bagaimana individu bisa menerima pengetahuan politik sebagai dasar bagi perilaku dan sikap politik mereka selanjutnya, yaitu partisipasi maupun pelaku politik. Disini bentuk partisipasi adalah partisipasi aktif individu dalam urusan politik kebangsaan, seperti pemilihan umum, kontrol sosial dan kebijakan serta yang lainnya. Sebagai pelaku mereka ikut terlibat langsung dalam proses politik. Kemudian setelah berpartisipasi atau menjadi pelaku diharapkan warga negara muda ini bisa melakukan refleksi terhadap sistem politik yang sedang terjadi, hal ini menunjang untuk terbentuknya *Political Culture* yang ideal.

Referensi

- Affandi. Idrus (1993). *Analisis Buku Political Education R Brownhill dan Patricia Smart* (makalah). Bandung; Lab PPKN IKIP.
- Affandi. Idrus (2011). *Pendidikan Politik (Mengefektivkan Organisasi Pemuda, Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945)* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Alfian (1978). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Alfian (1981). *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Alfian dan Sjamsudin, Nazaruddin. (1991). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafitti
- Almond, Gabriel A dan Sydney Verba (1990). *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
- Anna Douglas. *Educating for real and hoped for political worlds: ways forward in developing political literacy* (Online). <http://www.citized.info/>
- Brownhill, R and Patricia Smart (1989). *Political Education*. London and New York: Routledge
- Budimansyah, D. (2006). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis portofolio*. *Jurnal Civics*. Vol 03. No 01.
- Carol A. Cassel And Celia C. Lo. 1997. *Theories Of Political Literacy*. *Political Behavior*, Vol. 19, No. 4
- Claes, Ellen, Hooghe. Marc Dan Stolle, Dietlind. (2009). *The Political Socialization Of Adolescents In Canada: Differential Effects Of Civic Education On Visible Minorities*. *Canadian Journal Of Political Science* Vol 42 No 3. Hal 613–636
- Fyfe, I. (2007). *Hidden in the curriculum: Political literacy and education for citizenship in Australia*. *Melbourne Journal of Politics*, 32, 110.
- Kavang, Dannis (1998). *Political Culture*. Bandung: CV Armico
- Kantaprawira, R. (1984). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung ; Sinar baru
- Kantaprawira, R. (2004). *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung ; Sinar Baru Algesindo
- Pratama, I. . (2020). *Pendidikan Politik di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi*. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 3(1), 15-22
- Rush, Michael dan Althoff, Philip (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali Press
- Schulz, W. (2005). *Political efficacy and expected political participation among lower and higher secondary students: a omparative analysis with data from the IEA civic education study*. A paper prepared for the ECPR General Conference in Budapest, 8 – 10 September 2005.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Sadeli, Ely H, dkk. (2009). *Bedah Buku Political Education dari Robert Brownhill dan Patricia Smart*. Bandung : Kencana Utama

Sastroadmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press

Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara